

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah diuraikan mengenai Public Private Partnership Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo, menggunakan teori Hollow State dari Provan dan Milward yaitu Dimensi Mekanisme yang meliputi pembiayaan, penentuan kontrak dan evaluasi, kemudian yang kedua ada dimensi struktur dan yang ketiga yaitu Insentif. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan informasi data di lapangan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa ketiga dimensi tersebut telah menjalankan perannya dengan baik sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Adapun Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dimensi Mekanisme

- 1) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan sektor swasta (PT BES/Reciki/PT Resinergi) diwujudkan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dan kontrak formal dengan masa berlaku lima tahun.
- 2) Mekanisme teknis mencakup kewajiban pihak swasta membangun, mengoperasikan, dan memodernisasi fasilitas pengolahan di area TPA yang dimiliki pemerintah daerah, sementara Pemerintah kabupaten Ponorogo memfasilitasi lahan serta mendukung perizinan.
- 3) Model pengelolaan di TPST Mrican didasarkan pada sistem pengolahan mekanis modern (pemilahan sampah), diolah menjadi bahan baku plastik

daur ulang, pupuk organik, serta refuse derived fuel (RDF) yang dikirim ke industri semen.

- 4) Namun, dalam praktiknya koordinasi teknis antar-lembaga masih menemui kendala, terutama menyangkut integrasi lintas sektor dan monitoring pelaksanaan

2. Dimensi Struktur

- 1) Struktur kelembagaan terdiri dari Pemerintah Kabupaten sebagai pemberi mandat, Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator dan pengawas, serta perusahaan swasta sebagai operator utama.
- 2) Skema PPP ini memperjelas peran dan tanggung jawab antara pemerintah (penyedia aset dan pengawas lingkungan) dan swasta (pelaksana operasi dan investasi teknologi), dengan pengawasan berkala yang dilakukan oleh dinas terkait.
- 3) Meskipun struktur formal cukup jelas, evaluasi menunjukkan kebutuhan peningkatan kapabilitas SDM dan penguatan koordinasi antar-aktor, termasuk pemberdayaan masyarakat di sekitar TPA agar upaya pengurangan sampah lebih efektif.

3. Dimensi Insentif

- 1) Insentif utama bagi mitra swasta adalah pemberian tipping fee, yaitu pembayaran dari pemerintah daerah sebesar Rp170.000 per ton sampah yang diolah di TPST Mrican.
- 2) Insentif lain berupa hak pengelolaan dan pemanfaatan hasil sampah olahan (seperti RDF, pupuk, dan plastik hasil daur ulang) secara penuh oleh pihak

operator, sedangkan Pemkab menerima imbal hasil berupa sewa lahan dan penurunan volume sampah.

- 3) Insentif bagi pemerintah adalah berkurangnya beban tumpukan sampah dan dampak lingkungan, serta peningkatan penerimaan daerah dari sewa lahan dan penjualan hasil pengolahan sampah.
- 4) Sistem insentif ini mendorong swasta berinovasi dalam efisiensi dan teknologi pengolahan, namun evaluasi berkala dibutuhkan agar besaran insentif tetap proporsional dan menyesuaikan dinamika volume serta jenis sampah yang masuk.

Skema Public Private Partnership di TPA Mrican menunjukkan potensi besar dalam penanganan sampah berbasis kolaborasi. Di sisi mekanisme dan struktur, kerjasama formal didukung aturan jelas, teknologi modern, dan pembagian peran yang tegas antara pemerintah dan swasta. Dari sisi insentif, model pembayaran *tipping fee* dan pemanfaatan hasil olahan menjadi daya tarik bagi investasi swasta. Namun, tantangan masih tampak pada proses koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perlunya evaluasi insentif agar pelaksanaan tetap efektif dan berkelanjutan. Penguatan aspek partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, dan tata kelola kolaboratif perlu terus dikembangkan untuk menjamin keberhasilan jangka panjang pengelolaan sampah melalui PPP di Ponorogo

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Public Private Partnership* (PPP) dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo yang menggunakan teori *Hollow State* dari Provan dan Milward, dapat disusun saran

kebijakan yang konstruktif bagi Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo. Mengingat ketiga dimensi utama dalam teori tersebut yaitu dimensi mekanisme, dimensi struktur, dan dimensi insentif telah dijalankan dengan baik, maka DLH disarankan untuk terus memperkuat aspek keberlanjutan dan efisiensi dari kerja sama ini.

1. Pada dimensi mekanisme, pemerintah perlu menjaga konsistensi dalam penerapan *tipping fee*, transparansi kontrak, serta evaluasi berkala yang melibatkan berbagai pihak agar tetap adaptif terhadap dinamika di lapangan.
2. Selanjutnya, dimensi struktur dapat ditingkatkan dengan memperluas kapasitas kelembagaan dan memastikan komunikasi antar pihak tetap lancar dan terbuka serta perlu adanya perpanjangan masa kontrak lebih dari lima tahun agar kerjasama bisa berjalan secara maksimal.
3. Sementara pada dimensi insentif, perlu adanya perumusan insentif tambahan non-finansial, seperti pengakuan kinerja atau akses ke pelatihan teknis, untuk meningkatkan motivasi pihak swasta dalam menjaga kualitas layanan pengelolaan sampah.

Kedepannya, Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan untuk melakukan inovasi berbasis teknologi dan memperluas replikasi model PPP ini ke wilayah lain di Ponorogo, guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih merata, berdaya saing, dan berkelanjutan.